

Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China)

Yusuf^{1*}, Ruqayyah², Retno Dwi Miliani³, Siti Kholijah Pulungan⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*^{1, 2, 3, 4}

^{*1}email: yusuf073097@gmail.com ,

²email: ruqayyahruqayyah64@gmail.com

Artikel Info

Received: 09 March 2021	Revised: 07 April 2021	Accepted: 28 May 2021	Published: 26 June 2021
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Abstract: Islamic finance has now become increasingly popular in many countries since the financial crisis of 2008, non-muslims have been using islamic finance to stabilize the economy. The methods of this study employ qualitative research and descriptive analysis of existing literature and literature studies. The study aims to learn about the development of islamic banking and finance in east Asia (Japan, South Korea and China). In Japan islamic finance is rapidly growing, as the islamic countries have been called by islamists in southeast Asia. In South Korea there are challenges to developing islamic finance especially in the issue of sukuk law. In China, the growth in islamic finance is very rapid with the innovation of the initial belt and road. Although all three have a challenge and But in the east Asian countries, the islamic banking developed its message.

Abstrak: Keuangan syariah sekarang menjadi semakin populer di berbagai negara semenjak krisis keuangan pada 2008 silam, negara non-Islam pun ikut menggunakan keuangan syariah ini untuk menstabilkan perekonomian. Metode dari penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif terhadap studi literatur dan kajian pustaka yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perbankan dan keuangan Islam di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China). Di Jepang perkembangan keuangan syariah sangat pesat dapat terlihat dari adanya kerjasama dengan negara-negara Islam di Asia Tenggara. Di Korea Selatan terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan keuangan syariah khususnya dalam masalah hukum penerbitan sukuk. Di China perkembangan keuangan syariah sangat pesat dibuktikan dengan inovasi

Keywords: *Development, Islamic Banking, Islamic Finance, Sukuk, East Asia.*

pembentukan *Belt and Road Initiative (BRI)*. Meskipun ketiganya memiliki tantangan dan kendala masing-masing akan tetapi di negara-negara Asia Timur perbankan syariah berkembang pesat.

Kata Kunci: *Perkembangan, Perbankan Syariah, Keuangan Syariah, Sukuk, Asia Timur.*

A. Pendahuluan

Sukuk dapat diringkas sebagai sertifikat keuangan yang memberikan kepemilikan nyata atas aset yang mendasari kepada pemegang Sukuk untuk mengumpulkan dana (berdasarkan prinsip-prinsip Islam) untuk pencetus instrumen keuangan. Meskipun Sukuk umumnya dikenal sebagai “obligasi Islam”, Sukuk secara bersamaan memiliki fitur obligasi dan saham sesuai dengan kontrak Islam yang menjadi dasarnya. Bahkan, fitur seperti obligasi adalah karakteristik utama dan paling menarik dari Sukuk penggunaan kontemporer, karena Sukuk Ijarah dan Murabahah memiliki jatuh tempo (Scott Marrison, 2013).

Selama empat dekade sebelumnya, keuangan Islam telah berkembang secara signifikan dan memiliki jangkauan global. Ini dianggap sebagai salah satu industri keuangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Keuangan syariah menjadi semakin populer di banyak negara sejak krisis keuangan tahun 2008 karena stabilitas keuangannya dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional lainnya. Di antara banyak jenis instrumen keuangan Islam, Sukuk, yang biasa disebut obligasi syariah, selama beberapa tahun terakhir telah dianggap sebagai kendaraan pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang paling efektif dan telah menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang paling cepat berkembang (Monzer Khan & Bhatti M. Ishaq, 2018). Akibatnya, banyak negara, termasuk non-

Muslim, tertarik dengan Sukuk, terutama untuk pembiayaan pemerintah dan swasta. Bahkan beberapa negara seperti Inggris Raya (UK) dan Singapura dengan penduduk minoritas Muslim telah menggunakan keuangan syariah dan sukuk. Negara-negara minoritas Muslim lainnya seperti Jepang, Cina, dan juga Korea Selatan sedang berusaha untuk memasukkan Sukuk untuk tujuan mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini memiliki beberapa permasalahan yang terkandung didalamnya yaitu: Bagaimana perkembangan perbankan syariah yang ada di jepang? Bagaimana perkembangan perbankan syariah yang ada di korea selatan? Bagaimana perkembangan perbankan syariah yang ada di china? Dan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah atau keuangan syariah di china. Untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah atau keuangan syariah di korea selatan serta untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah atau keuangan syariah di jepang.

Maka judul penelitian ini adalah “Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China)” judul penelitian ini membahas perkembangan-perkembangan Perbankan Syariah di negara Asia Timur yang nantinya dibahas lebih mendalam pada hasil pembahasan sub bab jurnal ini.

B. Telaah Literatur

1. Muslim di Jepang

Jepang adalah negara yang paling mirip dengan Korea dalam hal lingkungan sosial budaya, dan juga dalam hal kesadaran Islam. Namun, di bidang keuangan Islam, mereka lebih maju dari Korea. Alasannya, meskipun Islam tidak memberikan pengaruh besar di Jepang sebagai agama karena populasi Muslim yang cukup kecil (Muslim di Jepang hanya terdiri dari 0,14% dari total populasi (0,18 juta), yang lebih sedikit dari populasi

Muslim Korea) dan kurangnya kesadaran Islam dan Muslim di masyarakat, Jepang mengakui nilai ekonomi keuangan Islam. Oleh karena itu, pemerintah Jepang telah membuat inisiatif dan memberikan dukungan untuk keuangan Islam untuk fasilitasi di dalam Jepang (Khan, Tariqullah, dkk, 2014).

2. Muslim di Korea Selatan

Sejarah Islam di Korea singkat (kurang dari 60 tahun). Selama akhir 1960-an, ketika harga minyak mulai melambung dan konstruksi berkembang pesat di Timur Tengah, minat Korea untuk menjangkau negara-negara Islam meningkat. Sebagai contoh, pada Oktober 1964 Federasi Muslim Korea (KMF) didirikan sebagai satu-satunya organisasi misionaris Islam di Korea (Ini adalah organisasi eksekutif Yayasan Islam Korea (KIF)). Saat ini ada 8 masjid di Korea (semua di kota yang berbeda) dan banyak lagi dari 60 Masalah sedang dioperasikan (Khan, Tariqullah, dkk, 2014).

Populasi Muslim Korea tetap pada tingkat yang rendah: situs web Muslim Population mengumumkan bahwa, pada 2014, seluruh populasi Muslim di Korea adalah 450.000. Namun, angka ini menghitung sebagian besar penduduk Muslim asing, termasuk penduduk sementara. Oleh karena itu, praktis jumlah Muslim di Korea jauh lebih sedikit daripada populasi yang diumumkan secara resmi (Khan, Tariqullah, dkk, 2014).

3. Muslim di China

Muslim telah berada di Cina selama 1.400 tahun terakhir untuk berinteraksi terus-menerus dengan masyarakat Cina, Menurut Sensus Penduduk China 2010, ada lebih dari 23 juta Muslim di China. Muslim menyumbang 1,7% dari 13 miliar total populasi Cina. Ada 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi di Tiongkok. Dari 56 kelompok etnis, Han adalah kelompok etnis terbesar (yaitu, 91,6% dari total populasi Cina). Kelompok etnis tidak termasuk Han dikenal sebagai kelompok etnis minoritas dan mereka terdiri dari 8,4% total populasi Cina. Dari 55 kelompok etnis minoritas di China,

sepuluh kelompok mayoritas beragama Islam. Kelompok-kelompok ini adalah Hui, Uyghur, Kazakh, Dongxiang Kirgistan, Uzbek, Salar, Tajik, Bonan, dan Tatar. Muslim Hui adalah kelompok Muslim terbesar di Cina, yang memiliki populasi lebih dari 10,5 juta pada tahun 2010 dan menyumbang sekitar 46% Muslim di Cina. Muslim Uyghur adalah kelompok Muslim terbesar kedua di Cina yang memiliki populasi lebih dari 10 juta penduduk pada tahun 2010 dan menyumbang sekitar 44% Muslim di Cina. Sementara Muslim tinggal di setiap wilayah di Tiongkok, mereka terutama terkonsentrasi di wilayah barat laut termasuk Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang. Daerah Otonomi Ningxia Hui Provinsi Gansu, dan Provinsi Qinghai. Menurut sebuah studi oleh Pew Research Center pada tahun 2009, Cina adalah negara dengan jumlah Muslim terbesar ketiga yang hidup sebagai minoritas setelah India dan Ethiopia (Abdul Gafoor, 2010).

C. Metode Penelitian

Pada pembuatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti berfokus kepada studi literatur dan kepustakaan yang didapat dari sumber-sumber terpercaya, dengan mengkaji dan mengamati setiap literatur yang dibahas didalam daftar bacaan untuk menemukan hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini.

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menganalisa dan memberikan penggambaran setiap daftar bacaan yang ada terkait dari materi yang dibahas, sehingga diperlukan pemikiran dan konsentrasi yang benar-benar tepat untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini terhadap perkembangan perbankan syariah atau keuangan syariah di Asia Timur yang terdiri dari Jepang, Korea Selatan dan China. Sehingga tercapailah tujuan dalam penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Perbankan Syariah di Jepang

a. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Jepang

Awal mula keuangan Islam di Jepang sulit dideteksi melalui media tertulis, namun sebuah buku berjudul "Perbankan Islam: Teori, Praktek dan Tantangan" yang ditulis oleh Fuad Abdullah Al-Omar & Mohammed Kayed Abdel-Haq pada tahun 1996, menunjukkan bahwa Bank Jepang (Industrial Bank of Japan), terlibat dalam perdagangan Islam di London pada 1980-an. Lebih jauh, ada banyak perusahaan Jepang yang terlibat dalam transaksi Islam di London, ditekankan oleh banyak bankir, konsultan di perusahaan energi, dan perusahaan perdagangan umum, atau Sougou Shousha, yang berbasis di London pada masa itu. Namun "keuangan Islam" pada masa itu sebagian besar terdiri dari jenis transaksi bay al iyna. "Peminjam" akan membeli sejumlah komoditas seperti minyak dan tembaga dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan menjualnya kembali ke penjual, atau "pemberi pinjaman", dengan pembayaran langsung kepada peminjam. Harga pembayaran spot akan lebih rendah dari yang ditangguhkan (Saito So & Igarashi Chika, 2010).

Fakta bahwa beberapa orang Jepang telah terlibat dalam perdagangan yang diperbolehkan syariah membantu penyebab keuangan Islam modern, ketika hal itu diperkenalkan ke Jepang sebagai fenomena global baru dalam keuangan internasional. Seiring dengan kenaikan harga minyak, keuangan Islam muncul di Jepang sekitar tahun 2004-2005, dan mereka yang berpengalaman dalam transaksi Islam sudah merasakannya dan menjelaskannya kepada orang Jepang lainnya.

Pada tahun 1990-an, ada beberapa perusahaan manajemen aset Jepang yang menawarkan produk reksa dana syariah untuk investor Muslim terutama di Timur Tengah. Nomura Asset Management menjual Al Nukhba Asia Equity Fund. DIAM, Manajemen Aset IBJ Daichi-life saat itu, menawarkan Dana Timur Tengah untuk

Ekuitas Jepang. Produk-produk ini disaring oleh dewan Syariah, dan dalam pengertian ini, kita juga dapat mengenalinya sebagai Islam dalam istilah modern (Scott Morrison, 2013).

Ketertarikan Jepang pada keuangan syariah dimulai pada tahun 2005. Lembaga keuangan Jepang bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah di Malaysia dan Uni Emirat Arab sebagai sarana ekspansi tidak langsung, dan keuangan syariah telah digunakan sebagai salah satu sarana untuk menarik investasi dari investor syariah di Jepang. Pada tahun 2007, sejumlah lembaga publik dan swasta Jepang mulai menjajaki keuangan syariah sebagai salah satu sarana untuk menarik investor syariah (terutama yang memiliki petrodolar) untuk berinvestasi di Jepang dengan berpartisipasi sebagai pengamat di *Islamic Financial Services Board*, sebuah standar internasional pengaturan organisasi untuk industri jasa keuangan Islam yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan Jepang telah berada di pasar Sukuk sejak 2007, ketika mereka mulai membiayai dana mereka melalui Sukuk oleh anak perusahaan di luar negeri. Sukuk pertama diterbitkan oleh *Aeon Credit Service* di Malaysia. Pada tahun 2010, Nomura Investment Company menerbitkan Sukuk, yang merupakan penerbitan pertama dalam US\$.

Dalam hal transaksi pribadi, selain komitmen awal Tokio Marine Group untuk Takaful beroperasi sejak awal abad ke-21, beberapa perusahaan dan anak perusahaannya di luar negeri telah melakukan transaksi pasar modal syariah di luar negeri sebagai berikut:

- 1) Anak perusahaan Malaysia dari AEON Credit Service dan Toyota Financial Service menerbitkan mata uang MYR sukuk musyarakah masing-masing pada tahun 2007 dan 2008.
- 2) Daiwa Asset Management mengatur pencatatan dana yang diperdagangkan di bursa sesuai Syariah pertama untuk saham Jepang di Singapura pada tahun 2008.

- 3) Nomura Holdings menerbitkan denominasi USD pertama sukuk Ijarah (USD100 juta) pada Juli 2010 di Malaysia berdasarkan sewa pesawat.
- 4) Daiwa Securities Capital Markets bertindak sebagai co-lead arranger untuk perwalian investasi real estate Islam yang terdaftar di Bursa Singapura pada November 2010.
- 5) Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ meluncurkan multicurrency USD500 juta sukuk program penerbitan menggunakan wakala al isthismar selama 1 tahun pada tahun 2014, dan telah menerbitkan mata uang JPY pertama sukuk di bawah program ini.

b. Kerangka Regulasi Keuangan Syariah Secara Umum

Untuk saat ini, Jepang tidak dilengkapi dengan kerangka peraturan lengkap untuk mengoperasikan keuangan Islam. Namun, pada bulan Desember 2008, peraturan bisnis perbankan dan asuransi Jepang dilonggarkan untuk memungkinkan anak perusahaan bank dan perusahaan asuransi Jepang menyediakan layanan keuangan syariah tertentu dalam bentuk seperti murabahah (penjualan biaya-plus) atau Ijarah (leasing) dengan mengubah Ordonansi Penegakan UU Perbankan dan UU Usaha Perasuransian (GIFR, 2010).

Saat ini, tidak ada gerakan eksplisit bagi bank Jepang untuk mendirikan anak perusahaan tersebut di Jepang, kecuali untuk beberapa kasus di mana anak perusahaan bank Jepang mengajukan otorisasi peraturan yang diperlukan untuk melakukan operasi keuangan syariah di luar negeri. Akibatnya, masalah kepatuhan Syariah, atau pengawasan pasar, belum dibahas di Jepang.

c. Status Keuangan Islam Saat Ini di Jepang Setelah Perubahan Hukum

Setelah amandemen undang-undang, keuangan Islam secara aktif dikembangkan di Jepang. Pada tahun 2007 dan 2008, setelah Jepang mengamandemen FIEL dan undang-undang perbankan dan asuransi, anak perusahaan dari lembaga keuangan Islam dan

bank dapat terlibat dalam transaksi keuangan Islam. Selain itu, dalam amandemen baru undang-undang tersebut, meskipun struktur Murabahah dan Ijarah dianggap berbeda dari struktur pinjaman yang ada, jika tujuannya adalah peminjaman uang. Jepang menganggap struktur baru tersebut dengan cara yang sama. mereka mempertimbangkan pinjaman konvensional. Selain itu, enggan mereformasi status pajak mereka menghilangkan hambatan sukuk di pasar Jepang.

2. Perkembangan Perbankan Syariah di Korea Selatan

a. Keuangan Islam di Korea

Ketertarikan Korea pada keuangan Islam dimulai pada tahun 2007 di kalangan perusahaan domestik, terutama perusahaan sekuritas. Selama tahun 2007 dan 2008, banyak perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara Muslim. Contoh pertama adalah kemitraan antara Good Morning Shin-Han Securities Co., Ltd dan KIBB (Kenanga Investment Bank Bhd) di Malaysia untuk tujuan memasuki pasar keuangan Islam pada tahun yang sama, Korea Investment Co.,Ltd mengadakan perjanjian kerjasama dengan Malaysia Berjaya Land Berhad dalam proses bergabung dengan pasar Islam pada tahun 2008. Daewoo Securities Co.,Lto mengadakan perjanjian kerjasama dengan CIMB Investment bank Berhad dan mencoba untuk menerbitkan Sukuk. Woori Investment Securities Co., Ltd menjalin kemitraan dengan Am Bank Group pada tahun 2007 dan mendirikan yayasan untuk menerbitkan Sukuk, mendirikan kantor mereka di Malaysia pada tahun 2008. Baru-baru ini, pada tahun 2010, perusahaan yang sama menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Qatar Islamic Bank untuk bisnis di bidang keuangan perusahaan dan perbankan investasi (Choi Jae-Gun & Seo Hee-Yul, 2011).

Di tingkat pemerintahan, krisis keuangan global memicu gerakan menuju keuangan Islam di pihak Korea. Tindakan pemerintah Korea terhadap pendirian dan penggunaan keuangan Islam:

- 1) Menjadi anggota pengamat Islamic Financial Services Board (ISFB) Kementerian pada Agustus 2008.
- 2) Strategi dan Keuangan; Komisi Jasa Keuangan; Jasa Pengawas Keuangan menggelar seminar bersama keuangan syariah dengan IFSB pada Januari 2009.
- 3) Vitalisasi keuangan Islam T/F (TF adalah konferensi di mana metode untuk memfasilitasi adopsi keuangan Islam di Korea dibahas (Lee, Lee & Jei, 2011, hal. 244)) telah beroperasi (diselenggarakan oleh Kementerian Strategi dan Keuangan; Komisi Jasa Keuangan; Kementerian Administrasi dan Keamanan Publik; Badan Pengawas Keuangan; dan banyak lembaga keuangan domestik) pada Maret 2009.
- 4) Korea tampil di KTT Dewan Layanan Keuangan Islam ke-6 yang diselenggarakan di Singapura pada Mei 2009.
- 5) Kementerian Strategi dan Keuangan menyerahkan RUU revisi undang-undang kontrol perlakuan pajak khusus kepada Majelis Nasional pada September 2009.
- 6) RUU yang direvisi kandas saat proses dibawa ke subkomite pajak pada November 2009
- 7) RUU yang direvisi melewati subkomite pajak pada Desember 2010.
- 8) RUU yang direvisi dibawa ke sesi sementara Majelis Nasional tetapi tidak lolos pada Februari 2011.
- 9) Federasi bank Korea bergabung dengan lokakarya keuangan Islam yang diadakan oleh Bank Sentral Qatar pada Juni 2013.
- 10) Menjadi anggota asosiasi IFSB pada Maret 2014.

Pemerintah Korea Selatan mengajukan amandemen kepada Majelis Nasional untuk undang-undang yang ada pada tahun 2009 untuk mengakomodasi dan memfasilitasi penerbitan Sukuk Ijarah dan Murabahah, yang memiliki kemungkinan besar berhasil di Korea di bawah sistem hukum saat ini di Korea.

Keberhasilan ini kemungkinan karena, dengan Sukuk tertentu, biaya yang lebih tinggi (dalam kisaran 1,5% hingga 3,3%) akan dikenakan dibandingkan dengan obligasi konvensional. Namun, undang-undang ini ditentang oleh mayoritas anggota di Majelis Nasional di Korea. Akibatnya, hambatan hukum untuk menerbitkan Sukuk terus ada di Korea Selatan (Khan, Tariqullah, dkk, 2014).

Kementerian Strategi dan Keuangan mengajukan RUU yang direvisi (akan dijelaskan secara rinci di bagian berikut) kepada Majelis Nasional untuk memfasilitasi adopsi Sukuk di Korea. Namun, RUU yang direvisi ini ditolak 6 kali selama 2 tahun (Ahn Soo-Hyun, 2010). Akibatnya, beberapa perusahaan yang berencana menerbitkan Sukuk dengan perusahaan di Malaysia mendapat pukulan besar. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada RUU yang direvisi atau argumen perubahan terkait dengan RUU asli yang diajukan.

Berita terbaru sangat menarik dan terlihat paling praktis pergerakan Korea ke pasar keuangan syariah. Bank of Korea diakui sebagai Associate member IFSB pada pertemuan ke-24 Dewan IFSB pada Maret 2014. Gerakan ini diharapkan dapat menciptakan link antara Korea dan pusat keuangan Islam di Asia Tenggara (Ahn Soo-Hyun, 2010).

b. **Proposisi yang ada**

Ada dua proposisi utama untuk adopsi Sukuk ke dalam sistem keuangan Korea. Yang pertama (menyamai negara lain) berpendapat bahwa Sukuk harus dianggap sebagai obligasi konvensional. Sebagian besar peneliti di Korea setuju dengan pendekatan ini, dan ini akan memungkinkan Sukuk dikenakan pajak dengan cara yang sama seperti obligasi saat ini. Selain itu, usulan amandemen undang-undang yang diajukan ke Majelis Nasional Korea pada tahun 2009 menyatakan bahwa Sukuk harus diterima sebagai obligasi. Faktanya, perubahan undang-undang ini mencerminkan apa yang telah dilakukan sebagian besar negara untuk keuangan Islam (menambahkan pasal

di bawah undang-undang yang ada atau mengubah beberapa pasal pajak untuk menghilangkan hambatan keuangan Islam).

Kang memberikan pendapat yang bertentangan dalam keyakinannya bahwa pendapatan Sukuk harus dibedakan dari bunga obligasi karena kedua konsep tersebut berbeda dari prinsip dan cara pembiayaannya (Kang Dae-Chang, 2012). Oleh karena itu, argumennya adalah bahwa Sukuk dan pendapatan dari Sukuk harus didefinisikan ke dalam kategori baru. Selain itu, Kang merinci masalah yang terkait dengan proposisi bahwa Sukuk harus diperlakukan seperti obligasi konvensional. Pertama, ia berpendapat bahwa mengabaikan perbedaan karakteristik penerbitan Sukuk versus obligasi dapat menyebabkan lebih banyak masalah hukum di kemudian hari. Hal ini karena, menurut situasi dan kontrak Islam yang berbeda, pendapatan tidak dapat dilihat sebagai bunga obligasi (tidak seperti Ijarah dan Murabahah), menciptakan lebih banyak beban pajak kasus per kasus. Argumen kedua yang berlawanan dari penelitian Kang adalah bahwa amandemen baru sebelumnya hanya mendefinisikan Ijarah dan Murabahah. Kang berpendapat bahwa, dengan mendefinisikan Sukuk dengan benar dan membedakannya dari kendaraan keuangan lain yang ada, Korea dapat (dan perlu) membuka pintu untuk transaksi Islam lainnya di luar Ijarah dan Murabahah.

Dalam konteks Korea, meskipun populasi Muslim di Korea lebih kecil, Sukuk telah mendapat perhatian serius tidak hanya dari pemerintah Korea tetapi juga dari lembaga keuangan Korea. Pada tahun 2009, Kementerian Strategi dan Keuangan mengajukan revisi RUU ke Majelis Nasional untuk memfasilitasi Sukuk di Korea. Revisi RUU ini mencakup pengakuan pendapatan Sukuk sebagai bunga obligasi dan amandemen undang-undang perpajakan yang diterapkan pada Sukuk sehingga dibebaskan dengan cara yang sama seperti obligasi konvensional. Namun, pada tahun 2012 RUU itu dicabut karena habis masa berlakunya tanpa persetujuan. Seiring dengan kegagalan

untuk memperkenalkan RUU yang direvisi, beberapa masalah hukum dan peraturan dalam penerbitan Sukuk telah muncul di Korea.

3. Perkembangan Perbankan Syariah di China

a. Layanan Perbankan untuk Muslim di China: Sejarah dan Bukti

Perusahaan Keuangan Pertama China yang Menyediakan Layanan Syariah: Pembiayaan Syariah Hezhou Perusahaan. Upaya pertama untuk memberikan layanan pembiayaan Syariah kepada Muslim Cina dilakukan oleh pengusaha Muslim di Linxia, Provinsi Gansu pada tahun 1980-an. Linxia, sebelumnya dikenal sebagai Hezhou, adalah ibu kota Prefektur Otonomi Linxia Hui. Meskipun merupakan kota kecil dan terletak di wilayah barat laut Cina yang kurang berkembang, Linxia terkenal dengan julukannya-"Mekah kecil Cina". Linxia mendapat julukannya karena telah menjadi pusat agama, budaya, dan komersial bagi Muslim Tionghoa selama berabad-abad (MU Chapra, 2018).

Pertama-tama, lembaga keuangan konvensional yang utama melayani bisnis besar dan sangat sulit bagi individu atau usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional tersebut pada waktu itu. Kedua, banyak umat Islam yang enggan menggunakan layanan perbankan konvensional karena keyakinan agama mereka. Misalnya, Industrial and Commercial Bank of China (CBC) melakukan survei di Ningxia pada tahun 1986 dan hasilnya menunjukkan bahwa hanya 13% dari 200 wiraswasta Muslim yang disurvei telah memiliki rekening formal di lembaga keuangan formal (MU Chapra, 2018).

Menyadari permintaan Muslim untuk layanan keuangan, pengusaha Muslim lokal mengusulkan layanan perbankan Islam di akhir 1980-an. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan bank sentral China, lembaga keuangan China pertama yang menyediakan layanan syariah-Hezhou Islamic Financing Company didirikan pada Februari 1987.

Perusahaan Pembiayaan Islam Hezhou menyediakan layanan simpanan dan pinjaman. Untuk layanan simpanan, "suku bunga" diganti dengan "tingkat imbalan". "Tingkat imbalan" didasarkan pada suku bunga deposito acuan yang ditentukan oleh bank sentral, tetapi bervariasi dengan keuntungan/kerugian yang diperoleh perusahaan dan faktor lain seperti Indeks Harga Konsumen. Imbalan dari simpanan dapat berupa uang tunai atau dalam bentuk barang.

Sedangkan untuk jasa peminjaman, "tingkat bunga" diganti dengan "tingkat bagi hasil". "Tingkat bagi hasil" didasarkan pada suku bunga pinjaman acuan yang ditentukan oleh bank sentral, tetapi bervariasi dengan keuntungan/kerugian yang diperoleh peminjam dan risiko industri tempat peminjam berada karena Perusahaan Pembiayaan Islam Hezhou memenuhi permintaan Muslim lokal untuk layanan perbankan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka dan berfokus pada kebutuhan keuangan usaha kecil, telah melayani komunitas Muslim setempat dengan sangat sukses selama bertahun-tahun.

Namun, karena ekonomi dan industri perbankan China terus berkembang, lembaga keuangan kecil seperti perusahaan pembiayaan Islam Hezhou menghadapi banyak tantangan. Dengan sedikit layanan (misalnya, hanya simpanan dan pinjaman) dan mekanisme kontrol yang lemah atas pinjaman yang tidak dapat ditagih, mereka tidak dapat bersaing dengan lembaga keuangan besar. Setelah dua puluh tahun beroperasi, Perusahaan Pembiayaan Islam Hezhou gulung tikar (kemudian dikenal sebagai koperasi kredit pedesaan Ningxia Jiefang Road) pada tahun 2007 (Xinvi Lu, 2014).

b. Peran Keuangan Syariah dalam Implementasi China dengan Belt and Road Initiative (BRI)

Belt and Road Initiative (BRI) adalah strategi pembangunan global yang diprakarsai oleh pemerintah China. Strategi BRI mempertimbangkan investasi dan pengembangan infrastruktur di 152 negara dan organisasi internasional yang berbeda

yang berlokasi di Asia, Timur Tengah, Eropa dan Afrika (Kao Tianyou, 2019). Ini awalnya diumumkan oleh pemimpin Republik Rakyat China Xi Jinping selama kunjungan resmi ke Kazakhstan dan Indonesia di 2013. Kata "Sabuk" mengacu pada jalur darat baik transportasi kereta api maupun jalan raya, atau yang disebut "Sabuk Ekonomi Jalur Sutra"; sedangkan kata "Jalan" mengacu pada jalur laut, disebut juga "Jalan Sutra Maritim Abad 21". Pemerintah China menganggap BRI sebagai "upaya untuk meningkatkan konektivitas regional China demi menyongsong masa depan yang lebih cerah". Ada yang berpendapat bahwa BRI merupakan strategi global yang bertujuan menjadikan Tiongkok sebagai pusat jaringan perdagangan dengan memperluas pengaruh dan kepentingannya ke banyak negara, yang mencakup lebih dari 60 persen populasi dunia (Kao Tianyou, 2019).

Total perkiraan biaya untuk semua proyek yang telah diusulkan, dibangun atau sedang dibangun berkisar antara USD 4 hingga 8 triliun. Sebagian besar proyek BRI berfokus pada pembangunan baru atau pembangunan kembali infrastruktur perdagangan seperti jalan, pelabuhan, bandara dan rel kereta api, serta sistem untuk menghasilkan dan mentransmisikan energi dan informasi. Tentu saja, aliran dana dan keuangan memainkan peran kunci dalam proyek-proyek besar tersebut. Keuangan Islam dapat memainkan peran penting dalam strategi pembiayaan BRI China, mengingat populasi Muslim yang besar di sepanjang rute BRI, khususnya di Kazakhstan, Pakistan dan Iran. Ketiga negara ini menempati posisi strategis yang merupakan bagian penting dari simpul-simpul Jalur Sutra selama keberadaan jalur perdagangan di era abad pertengahan. Dengan posisi unik Iran dan Pakistan dalam ekonomi Islam modern, China harus mempertimbangkan produk keuangan Islam untuk membiayai proyek infrastruktur terkait BRI (Tarif Djafri, dkk, 2021).

Selanjutnya, keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam implementasi dan pengembangan BRI, terutama melalui penerbitan Sukuk. Sukuk dapat menyediakan

platform pembiayaan yang ideal dan praktis untuk perusahaan dan individu yang mencari peluang bisnis baru serta diversifikasi sumber dana untuk perusahaan konstruksi. Selain itu, mengeluarkan.

Sukuk akan membuat China lebih mudah didekati oleh segmen investor baru serta memperkuat interkoneksi keuangannya dengan negara-negara Muslim di sepanjang rute BRI.

Mempromosikan Sukuk di Cina akan memperluas pengaruh Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) secara global, karena Bank Pembangunan Islam sedang menjajaki potensi penerbitan Sukuk melalui AIIB. Dengan kata lain, keterlibatan investor Cina dengan Sukuk akan memperkuat komunikasi dengan negara-negara Muslim, yang dapat mendorong minat korporasi dan investor untuk memperluas bisnis mereka di sepanjang rute yang direncanakan BRI.

c. **Potensi Masalah dan Tantangan yang dihadapi Pengenalan dan Implementasi Keuangan Syariah di Tiongkok**

Ada sejumlah tantangan yang mungkin dihadapi pengenalan keuangan Islam di Cina. Tantangan pertama adalah kemauan politik. Kesiediaan dan dukungan pemerintah adalah kunci keberhasilan pengenalan keuangan Islam ke pasar Keuangan China. Bank sentral China dan regulator harus memahami bahwa sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Banyak negara di barat baru-baru ini mengizinkan pengoperasian bank syariah dalam yurisdiksi masing-masing.

Tantangan kedua terkait dengan kerangka regulasi dan hukum untuk mengakomodasi sistem keuangan Islam. Negara-negara yang ingin meluncurkan produk perbankan syariah harus terlebih dahulu membuat kerangka hukum yang mengatur kerja lembaga keuangan Islam. Misalnya, di Malaysia, undang-undang peraturan kodifikasi pertama yang memfasilitasi infrastruktur perbankan Islam adalah Undang-Undang

Perbankan Islam (IBA) 1983. Hal ini diikuti oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang memungkinkan LKI menjalankan bisnis dan layanan keuangan Islam. Oleh karena itu, untuk memperkenalkan keuangan Islam di Cina, kerangka hukum yang komprehensif harus dikembangkan termasuk amandemen undang-undang agar sesuai dengan penerapan keuangan Islam di negara tersebut.

Tantangan ketiga yang mungkin dihadapi pengenalan keuangan Islam terkait dengan pajak dan hambatan peraturan. Terlepas dari potensinya yang sangat besar dan kemunculannya sebagai sistem alternatif untuk perbankan konvensional, sejauh ini bank syariah memiliki dampak terbatas pada akses keuangan, karena mereka tidak berurusan dengan sebagian besar instrumen keuangan yang ditawarkan di pasar uang. Akibatnya, regulator harus menawarkan berbagai konsesi dan bantuan untuk membuka potensi ini. Penting untuk mengurangi pajak dan mengurangi hambatan peraturan untuk membiayai bank syariah, dan juga memperkuat infrastruktur keuangan.

Tantangan lain yang mungkin dihadapi pengenalan keuangan Islam di Cina adalah kurangnya kesadaran. Kesadaran didefinisikan sebagai partisipasi pasif individu dan membangkitkan minat tentang isu-isu tertentu. Banyak penelitian menegaskan pentingnya kesadaran dalam mempengaruhi persepsi pelanggan tentang berpartisipasi dalam produk dan layanan baru. Karena keuangan Islam adalah pendatang baru yang potensial ke pasar Cina, pemerintah Cina harus memainkan peran penting dalam mempromosikan keuangan Islam dan menyebarkannya melalui berita, konferensi, seminar, dan sebagainya demi menjangkau massa untuk memenuhi hasil yang diharapkan. Juga, pengenalan keuangan Islam di Cina akan membutuhkan upaya bersama dan kolaborasi dengan negara-negara dan organisasi internasional seperti IFSB dan AAOIFI. Upaya ini akan memfasilitasi proses implementasi dengan biaya yang efektif dan memungkinkan China untuk memanfaatkan praktik terbaik industri.

E. Simpulan

Perkembangan keuangan syariah di Jepang dimulai pada tahun 2007, sebagai salah satu sarana untuk menarik investor syariah (terutama yang memiliki petrodolar) untuk berinvestasi di Jepang dengan berpartisipasi sebagai pengamat di *Islamic Financial Services Board*, sebuah standar internasional pengaturan organisasi untuk industri jasa keuangan Islam yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan Jepang telah berada di pasar Sukuk sejak 2007, ketika mereka mulai membiayai dana mereka melalui Sukuk oleh anak perusahaan di luar negeri.

Begitu juga dengan Korea selatan, Ketertarikan Korea pada keuangan Islam dimulai pada tahun 2007 di kalangan perusahaan domestik, terutama perusahaan sekuritas. Selama tahun 2007 dan 2008, banyak perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara Muslim. Walaupun terdapat kendala dalam penerbitan sukuk Korea Selatan tetap menjajaki dan berusaha mengembangkan keuangan syariah mereka.

Sedangkan pada ekonomi dan industri perbankan syariah China dimulai lebih lama dari pada negara-negara Asia Timur lainnya. Walaupun pada awal perkembangan terdapat sedikit layanan (misalnya, hanya simpanan dan pinjaman) dan mekanisme yang lemah, namun sekarang ini keuangan syariah di China meningkat pesat dengan ikut dikembangkannya inovasi Belt and Road Initiative (BRI) yang diharapkan akan menarik investor luar untuk menginvestasikan dana mereka ke China.

F. Daftar Pustaka

- Ahn Soo-hyun, A. (2010). Tinjauan Regulasi Keuangan Keuangan Islam”, *Jurnal Riset Stabilitas Keuangan*, 11(2), 123-165.
- Chapra, M. U. (2019). Etika dan ekonomi: Sebuah perspektif Islam. *Jurnal ekonomi Islam Studi*, 16(1), 34-56.

- Gafoor, A. (2010). *Perbankan Islam*. Tiongkok
- Jae-Gun, C., & Seo H. Y. (2011). Isu Perpajakan Obligasi Syariah – Studi Pengenalan Sukuk, *Institut Keuangan Publik Korea*, 11(3), 223-240.
- Kang Dae-Chang, K. (2012). *Struktur dan Implikasi Kebijakan Keuangan Islam: difokuskan pada Sukuk*. Institut Korea untuk Kebijakan Ekonomi Internasional
- Khan, M., & Bhatti M. I. (2018). *Perkembangan Perbankan Syariah*. Palgrave: Macmillan
- Laporan Keuangan Islam Global. (2010). *Fajar Keuangan Islam di Jepang*. Jepang: GIFR.
- Lu, X. (2014). Studi Layanan Perbankan Bagi Muslim China. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 5(2), 2227-2234.
- Morrison, S. (2013). *Obligasi Islam Tidak Terikat: Sukuk..* Samurai Jepang: The Newsletter.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Panduan Pasar Obligasi. (2016). *Keuangan Islam di Jepang*. Jepang.
- Setiawan, H. R., & Abrianto, D. (2019). *Sistem Finansial Pendidikan*. Yogyakarta: Bildung.
- So, S., & Igarashi, C. (2010). *Keuangan Islam di Jepang*. Jepang.
- Tarif Djafri, T., dkk. (2021). Perspektif Global Keuangan Islam dan Potensi China untuk Memasuki Pasar Keuangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 11(1), 14-28.

Tariqullah, K., dkk. (2014). Masalah Hukum dan Peraturan Penerbitan Sukuk di Korea Selatan Pelajaran dari Pengalaman Negara Berkembang. *Jurnal Internasional Ekonomi, Perdagangan dan Manajemen*, 2(7), 1-39.

Tianyou, K. (2019). *Bangkitnya Keuangan Islam di Sabuk dan Jalan China*. Universitas Islam Internasional Malaysia.

Umam, K., & Setiawan, B. U. (2017) *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo, E., dkk. (2015). *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I

www.ojk.go.id tentang syariah perbankan syariah dan kelembagaannya. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021, pukul 14.32.